



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Manajemen Pengelolaan Obat di UPT Puskesmas Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang

Drug Management at the Kutalimbaru Health Center UPT, Deli Serdang Regency

Indah Doanita Hasibuan^{1*}, Riani Asyakra¹, Siti Soraya Tambunan¹, Alya Az zahra Sibuea¹, Sofyan Alri Ansyah Tanjung¹, Kina Sari¹

¹Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

*Correspondence Author: doanitaindah@uinsu.ac.id

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 10 Jan, 2025

Revised: 21 Feb, 2025

Accepted: 27 Feb, 2025

Kata Kunci:

Manajemen Farmasi;
Pelayanan Kesehatan;
Pengelolaan Obat;
Puskesmas

Keywords:

Pharmacy Management;
Health Services;
Drug Management;
Health Centers

DOI: [10.56338/jks.v8i2.6846](https://doi.org/10.56338/jks.v8i2.6846)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi manajemen pengelolaan obat di UPT Puskesmas Kutalimbaru, yang mencakup aspek perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, hingga penggunaan obat. Pengelolaan obat yang efektif dan efisien merupakan kunci untuk memastikan ketersediaan obat secara berkelanjutan dan mendukung pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar proses pengelolaan obat telah berjalan sesuai prosedur, masih terdapat beberapa tantangan, seperti ketidaksesuaian antara perencanaan kebutuhan dan realisasi pengadaan, serta penyimpanan yang belum sepenuhnya memenuhi standar. Temuan ini menyoroti pentingnya peningkatan sistem pengelolaan obat, termasuk pelatihan bagi petugas dan penerapan teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan efisiensi. Dengan manajemen yang lebih baik, puskesmas dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

ABSTRACT

This study aims to evaluate drug management at UPT Puskesmas Kutalimbaru, which includes aspects of planning, procurement, storage, distribution, and use of drugs. Effective and efficient drug management is key to ensuring the continuous availability of drugs and supporting health services to the community. This study used a descriptive approach with data collection through observation, interviews, and document analysis. The results showed that although most of the drug management process has been running according to procedures, there are still some challenges, such as a mismatch between planning needs and realization of procurement, as well as storage that has not fully met the standards. These findings highlight the importance of improving the drug management system, including training for staff and implementing information technology to support transparency and efficiency. With better management, puskesmas can improve the quality of health services to the community.

PENDAHULUAN

Puskesmas merupakan salah satu Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif di suatu wilayah kerja Puskesmas sebagai penyelenggara pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Tujuan di selenggarakannya pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal, Baik secara sosial maupun ekonomi (Nur Azizah & Elvi Murniasih, 2023).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas menyebutkan bahwa pelayanan kefarmasian di Puskesmas merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berperan dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan, pelayanan kefarmasian di lakukan secara terpadu yang meliputi kegiatan pengelolaan sediaan farmasi dan kegiatan pelayanan farmasi klinik. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai sangat di perlukan dalam meningkatkan efektivitas pelayanan (MENKES, 2016).

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 bahwa puskesmas adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Salah satu pelayanan penunjang yang ada di Puskesmas adalah pelayanan farmasi. Hal ini juga menjadi revenue center utama bagi puskesmas karena sekitar 90% pelayanan kesehatan memanfaatkan perbekalan farmasi yang meliputi obat-obatan, bahan kimia, bahan radiologi, bahan alat kesehatan, alat kedokteran dan gas medik. Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) RI Nomor 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan farmasi di puskesmas menjadi acuan yang digunakan bagi tenaga kefarmasian dalam pengelolaan obat di Puskesmas (Nurzamzami Aris, 2023).

Pengelolaan obat yang baik sangat diperlukan untuk menghindarkan terjadinya kerugian yang disebabkan karena kesalahan yang diawali dari penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran obat. Keterpaduan antara pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut menjadi faktor penentu bahwa proses manajemen telah berjalan dengan efektif dan efisien. Ketidakefisienan ketidaklancaran pengelolaan dan obat mengharuskan dilakukannya analisis manajemen obat. Hal ini untuk mencegah terjadinya dampak negatif dalam pelayanan kefarmasian secara keseluruhan baik secara medik, sosial dan ekonomi (Nurhidayah Ayi, Setianingsih Zuniawati Lilis, 2023).

Pengelolaan obat di puskesmas perlu di teliti karena pengelolaan obat yang efisien sangat menentukan keberhasilan manajemen puskesmas secara keseluruhan, untuk menghindari perhitungan kebutuhan obat yang tidak akurat dan tidak rasional sehingga perlu dilakukan pengelolaan obat yang sesuai. Terjaminnya ketersediaan obat di pelayanan kesehatan akan menjaga citra pelayanan kesehatan itu sendiri, sehingga sangat penting menjamin ketersediaan obat (Asnawi et al., 2019).

Proses pengelolaan obat di puskesmas merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan, karena apabila pengelolaan obat tidak sesuai dengan prosedur akan menimbulkan masalah tumpang tindih anggaran serta pemakaian obat yang tidak tepat. Hal tersebut mengakibatkan ketersediaan obat menjadi berkurang, obat menumpuk karena perencanaan obat yang tidak sesuai, serta biaya obat menjadi mahal karena penggunaan obat yang tidak rasional. Selain itu, dampak akibat perencanaan yang tidak sesuai menyebabkan tempat penyimpanan obat menjadi penuh sehingga obat berisiko menjadi kadaluwarsa, rusak hingga stok mati (Khairani et al., 2021).

Salah satu ruang lingkup pengelolaan obat adalah penyimpanan obat. Proses penyimpanan obat yang tidak sesuai dapat menimbulkan kerugian seperti tidak dapat mempertahankan mutu dari sediaan obat sehingga obat menjadi kadaluwarsa sebelum tanggalnya tiba. Pelayanan obat dapat berjalan baik dan tepat jika didukung penyimpanan obat yang sesuai (et al., 2023)

Pengadaan obat merupakan bagian terbesar dari anggaran kesehatan. Di negara maju, biaya obat berkisar 10-15% dari anggaran kesehatan. Sementara itu negara berkembang, biaya ini lebih besar lagi antara 35-65%, sedangkan di indonesia 39%. Tanggung jawab pengadaan obat essensial untuk pelayanan kesehatan dasar bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan menjadi

tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Nurlaela et al., 2022).

Pengadaan adalah suatu usaha atau kegiatan untuk memenuhi kebutuhan operasional yang telah ditetapkan di dalam fungsi perencanaan, Proses pelaksanaan rencana. pengadaan dari fungsi perencanaan dan. penentuan kebutuhan, serta rencana pembiayaan dari fungsi penganggaran. Tujuan pengadaan obat adalah untuk memenuhi kebutuhan obat disetiap unit pelayanan kesehatan sesuai dengan pola penyakit di wilayah kerja Puskesmas (Ismail & Sumaila, 2020).

Pengadaan obat di Puskesmas dilakukan untuk memperoleh jenis dan jumlah obat, obat dengan mutu yang tinggi, menjamin tersedianya obat dengan cepat dan tepat waktu. Oleh karena itu, pengadaan obat harus memperhatikan dan mempertimbangkan bahwa obat yang diminta atau diadakan sesuai dengan jenis dan jumlah obat yang telah direncanakan (Aripa et al., 2019).

Obat merupakan unsur penting dalam. berbagai upaya pelayanan kesehatan. Sebagian. besar upaya pelayanan kesehatan menggunakan obat dan biaya yang digunakan untuk obat merupakan bagian yang cukup besar dari seluruh biaya kesehatan. Intervensi dengan obat pun merupakan intervensi yang paling banyak digunakan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Ketersediaan obat pada unit Pelayanan Kesehatan sangat mempengaruhi mutu pelayanan kesehatan. Karena itu perlu adanya pengelolaan obat yang baik yang bertujuan menjamin kelangsungan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan obat yang efisien, efektif dan rasional (Negara, 2014).

Salah satu aspek penting lain dan. menentukan dalam pengelolaan obat adalah pengadaan obat. Sebuah proses pengadaan yang efektif akan menjamin ketersediaan obat yang tepat dengan kuantitas yang tepat, pada harga pantas dan pada standar kualitas diakui. Hal lain yang dianggap perlu diketahui dalam hal pengadaan obat adalah prosedur pengadaan obat. Karena ketidaksesuaian prosedur pengadaan obat dengan aturan yang berlaku merupakan salah satu masalah yang terjadi dalam hal pengadaan obat. Dan hal ini akan berdampak kepada ketersediaan obat di suatu unit pelayanan kesehatan.

Puskesmas Kutalimbaru merupakan salah satu puskesmas rawat inap yang berada di Jl. Besar Pasar X, Desa Kutalimbaru, Kec. Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Puskesmas Kutalimbaru terletak tepat di pinggir jalan yang cukup strategis, akan tetapi puskesmas kutalimbaru tidak berada di lokasi jalan raya, tidak memungkinkan orang yang dari luar kutalimbaru berobat ke puskesmas tersebut, di karenakan lokasi nya yang berada di dalam perdesaan, dan kemungkinan juga yang berobat ke puskesmas kutalimbaru hanya pasien yang dekat dengan puskesmas kutalimbaru saja. Terdapat beberapa masalah di Puskesmas Kutalimbaru yaitu Tenaga manajemen kesehatannya kurang (tetapi bisa di handle), Gudang penyimpanan obatnya juga kecil, dan yang bertanggung jawab di manajemen obatnya hanya 1 orang yaitu kepala gudang obat saja.

Dari permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “Manajemen Pengelolaan Obat Di Puskesmas Kutalimbaru”.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menganalisis pengelolaan manajemen logistik obat. Lokasi penelitian berada Puskesmas Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Sampel penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu yang ditetapkan oleh peneliti, sesuai dengan karakteristik populasi. Informan pada penelitian yaitu pihak puskesmas yang bertanggung jawab bagian pengelolaan obat. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan observasi. Instrumen penelitian yang digunakan meliputi alat perekam seperti tape recorder untuk merekam wawancara dengan informan, serta pedoman wawancara yang kemudian akan dianalisis dan diberikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karena terbatasnya Tenaga Manajemen obat di Puskesmas Kutalimbaru maka pada penelitian ini menggunakan 2 informan, yaitu kepala puskesmas dan penanggung jawab gudang obat.

No.	Jabatan	Umur	Pendidikan
1.	Kepala puskesmas	38	S2
2.	Penanggung jawab gudang obat	43	S1

Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data berupa data primer dan data sekunder. Data primer yaitu hasil wawancara dengan informan yaitu kepala puskesmas dan penanggung jawab gudang obat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi serta observasi di lapangan.

Manajemen pengelolaan obat merupakan salah satu fungsi yang menentukan dalam proses perencanaan obat, pengadaan obat, pendistribusian obat, penyimpanan obat, dan penghapusan obat. Yang bertujuan untuk menetapkan jenis dan jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang tepat sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di Puskesmas. Perencanaan obat di Puskesmas Rawat Inap Kutalimbaru dilakukan setiap tahun serta direncanakan berdasarkan konsumsi jumlah pasien tahun sebelumnya, dimana dengan data – data tersebut obat yang direncanakan dapat tepat jumlah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kurun waktu tertentu.

Manajemen Pengelolaan Obat merujuk pada serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan semua aspek terkait obat, termasuk pengadaan, penyimpanan, distribusi, penggunaan, serta pengawasan obat dalam suatu fasilitas pelayanan kesehatan. Tujuan utama manajemen pengelolaan obat adalah untuk memastikan bahwa obat yang disediakan aman, efektif, tepat guna, dan terjangkau, serta tersedia dalam jumlah yang cukup dan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan pasien.

Perencanaan

Perencanaan obat di Puskesmas Rawat Inap Kutalimbaru sudah sesuai dengan prosedur pengelolaan obat atau sudah sesuai dengan SOP dalam menjalankan perencanaan obat. Menurut Kepmenkes nomor 1121/MENKES/SK/XII/2008. Perencanaan dilakukan oleh dinas kesehatan kemudian disampaikan kepada Puskesmas Rawat Inap Kutalimbaru. Perencanaan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk menentukan jenis, jumlah, dan harga perbekalan farmasi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan anggaran (Masruriati Eni, 2024). Perencanaan obat di Puskesmas dilakukan untuk menentukan jenis dan jumlah kebutuhan obat. Kebutuhan obat Puskesmas direncanakan oleh petugas pengelola obat dilaksanakan setiap bulan. Proses perencanaan kebutuhan obat untuk menghindari terjadinya kekosongan obat. Perencanaan obat mempengaruhi ketersediaan obat di Puskesmas sehingga tersedia jenis dan satuan jumlah paket 5 paket 3 tab 100 vial 3 tab 180, jumlah obat yang tepat sesuai dengan kebutuhan.

Penganggaran Obat

Penganggaran Obat di Puskesmas adalah proses perencanaan, alokasi, dan pengelolaan dana yang digunakan untuk pengadaan obat-obatan di Puskesmas. Penganggaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa Puskesmas dapat menyediakan obat yang cukup dan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan pengobatan bagi pasien. Penganggaran obat di Puskesmas mencakup berbagai kegiatan, mulai dari perencanaan kebutuhan obat berdasarkan jenis penyakit yang umum terjadi, jumlah pasien yang dilayani, hingga pengadaan dan distribusi obat yang terkontrol dengan baik (Sri Devi et al., 2024).

Penganggaran obat di Puskesmas Rawat Inap Kutalimbaru melibatkan dua sumber dana utama, yaitu APBD dan JKN. APBD digunakan untuk memenuhi kebutuhan obat bagi pasien non-JKN atau obat-obat yang tidak tercakup dalam program JKN, sedangkan dana JKN digunakan untuk pengadaan obat bagi pasien yang terdaftar dalam program JKN. Pengelolaan kedua sumber anggaran ini memastikan bahwa Puskesmas dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat dengan memanfaatkan dana yang tersedia secara efisien dan sesuai dengan kebutuhan medis yang ada.

Pengadaan Obat

Pengadaan obat tidak menggunakan e-purchasing, melainkan pengadaan dilakukan secara langsung dari dinas kesehatan maupun pembelian secara langsung dari apotek/kimia farma, Namun Puskesmas Rawat Inap Kutalimbaru biasanya mengikuti sistem e-katalog, yang merupakan platform online resmi dari pemerintah Indonesia, yang menyediakan daftar obat dan alat kesehatan yang telah melalui proses seleksi dan penetapan harga. Sistem e-katalog ini memudahkan proses pemilihan dan pembelian obat karena sudah ada daftar produk yang disetujui beserta harganya. Terkait jika terdapat obat yang expired Puskesmas Rawat Inap Kutalimbaru akan membuat berita acara kemudian obat akan langsung dikembalikan ke dinas kesehatan.

Pengadaan di Puskesmas Rawat Inap Kutalimbaru dilakukan dengan menggunakan formulir yang disetujui oleh Kepala Puskesmas ke Dinas Kesehatan Kota baru pengambilan ke gudang farmasi Pengadaan Obat setiap ada kasus, bisa satu bulan sekali, 3 bulan sekali, tergantung dari kondisi yang terjadi. Sumber penyediaan obat di Puskesmas adalah berasal dari dinas kesehatan kabupaten/kota (Mulyani, 2021). Pengadaan obat di Puskesmas Rawat Inap Kutalimbaru sudah sesuai dengan prosedur pengelolaan obat.

Pengadaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan dan disetujui melalui pembelian, baik secara langsung atau tender dari distributor, produksi / pembuatan sediaan farmasi baik steril maupun non steril, maupun yang berasal dari sumbangan (Nurlaela et al., 2022). Penerimaan obat adalah suatu kegiatan dalam menerima obat dari instalasi farmasi kabupaten/kota sesuai dengan permintaan yang telah diajukan. Tujuannya adalah agar obat yang diterima sesuai dengan kebutuhan berdasarkan permintaan yang diajukan puskesmas.

Penyimpanan Obat

Penyimpanan obat yang dilakukan di Puskesmas Rawat Inap Kutalimbaru menggunakan sistem FIFO (First In First Out) dan FEFO (First Expired First Out) merupakan dua metode yang digunakan untuk menjaga kualitas dan efektivitas obat yang disediakan untuk pasien. Kedua metode ini sangat penting untuk menghindari obat yang kadaluwarsa atau rusak digunakan pada pasien. FIFO (First In, First Out) Prinsip FIFO adalah metode penyimpanan di mana obat yang pertama kali masuk (first in) adalah yang pertama kali dikeluarkan (first out) (Ramadhan Bintang Rafi M, Hidayati Rosmalina Agriana, 2024). Dalam hal ini, obat yang pertama kali diterima atau disimpan harus digunakan atau dikeluarkan terlebih dahulu sebelum obat yang lebih baru. Tujuan FIFO adalah untuk memastikan bahwa obat yang lebih lama tidak menumpuk di dalam penyimpanan dan tetap digunakan terlebih dahulu, menghindari obat kadaluwarsa atau terbuang karena tidak digunakan dalam waktu yang wajar. Sedangkan FEFO (First Expired, First Out) adalah metode penyimpanan di mana obat yang memiliki tanggal kedaluwarsa lebih awal (first expired) harus digunakan atau dikeluarkan terlebih dahulu. Ini berarti, meskipun obat tersebut bukan yang pertama kali disimpan, jika obat tersebut memiliki masa kedaluwarsa yang lebih dekat, ia akan dikeluarkan lebih dulu daripada obat dengan tanggal kedaluwarsa yang lebih jauh.

Penyimpanan obat di Puskesmas Rawat Inap Kutalimbaru dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kualitas, efektivitas, dan keamanan obat yang akan digunakan oleh pasien. Sistem penyimpanan obat di puskesmas ini mengikuti prosedur yang ketat untuk memastikan obat yang disediakan selalu dalam kondisi baik dan tidak kadaluwarsa. Obat disimpan dengan memperhatikan kondisi penyimpanan yang diperlukan, seperti suhu dan kelembapan. Beberapa obat perlu disimpan di tempat yang sejuk dan kering, sementara obat tertentu membutuhkan penyimpanan dalam kulkas (misalnya vaksin atau antibiotik tertentu).

Pendistribusian Obat

Pendistribusian merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan/menyerahkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dari tempat penyimpanan sampai kepada unit pelayanan/pasien dengan tetap menjamin mutu, stabilitas, jenis, jumlah, dan ketepatan waktu. Sistem distribusi harus dapat menjamin terlaksananya pengawasan dan pengendalian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai di unit pelayanan. Sistem distribusi dirancang atas dasar kemudahan untuk dijangkau oleh pasien dilakukan dengan cara sistem persediaan lengkap diruangan (floor stock), sistem resep perorangan, sistem unit dosis atau kombinasi (Lembong & Kalalo, 2022).

Pendistribusian obat di Puskesmas Rawat Inap Kutalimbaru dilakukan dengan sistem kelola dari Dinas Kesehatan kemudian disalurkan ke unit-unit pelayanan sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit untuk diserahkan ke pasien. Pendistribusian obat di Puskesmas Rawat Inap Kutalimbaru sudah sesuai dengan pedoman pengelolaan obat di Puskesmas

Penanggung jawab yaitu apoteker memeriksa kondisi obat yang diserahkan terimakan seperti tanggal expire, nomor batch, kemasan, jenis dan jumlah obat, bentuk sediaan obat sesuai dengan isi dokumen (LPLPO), dan ditanda tangani. Setelah dilakukan pemeriksaan tersebut, asisten apoteker menandatangani bukti serah terima obat tersebut. Bila ditemukan adanya obat yang tidak memenuhi syarat dalam hal ini terjadi kekurangan atau kerusakan maka petugas penerima dapat mengajukan keberatan. Setiap penambahan obat, dicatat dan dibukukan pada buku penerimaan obat dan kartu stok (Kemenkes, 2016).

KESIMPULAN

Manajemen pengelolaan obat di UPT Puskesmas Kutalimbaru secara umum telah berjalan sesuai dengan prosedur standar, namun masih terdapat beberapa kekurangan yang memerlukan perhatian. Dalam tahap perencanaan, terdapat ketidaksesuaian antara kebutuhan obat yang direncanakan dan realisasi pengadaan, yang berpotensi menyebabkan kekurangan atau kelebihan stok. Proses penyimpanan obat juga belum sepenuhnya memenuhi standar keamanan dan kualitas, seperti pengaturan suhu ruangan dan penataan obat yang sesuai. Kendala lain ditemukan pada pendistribusian obat yang terkadang tidak tepat waktu, sehingga memengaruhi pelayanan kepada masyarakat.

SARAN

Perbaikan sistem perencanaan kebutuhan obat di UPT Puskesmas Kutalimbaru difokuskan pada optimalisasi penggunaan data berbasis layanan dan penyakit, penerapan teknologi informasi melalui aplikasi manajemen farmasi, serta peningkatan standar penyimpanan obat. Selain itu, pelatihan rutin bagi petugas dan pengawasan berkala dilakukan untuk memastikan kompetensi dalam manajemen farmasi, disertai dengan peningkatan koordinasi dengan dinas kesehatan dan pemasok. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan obat, meminimalkan risiko kekurangan atau kelebihan, dan mendukung pelayanan kesehatan yang lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- aripa, L., Sudarman, S., & Alimin, B. (2019). Pelaksanaan Pengelolaan Obat Di Puskesmas Brombong Kota Makassar. *Jurnal Promotif Preventif*, 1(2), 18–29.
- Asnawi, R., Kolibu, F. K., & Maramis, F. R. R. (2019). Analisis Manajemen Pengelolaan Obat Di Puskesmas Wolaang. *Jurnal Kesmas*, 8(6), 306–315.
- Ilahi, F. S., Yumassik, A. M., & Saputera, M. M. A. (2023). Pembuatan Aplikasi Penyimpanan Obat (Apo) Dalam Pengontrolan Masa Kadaluarsa Obat Di Apotek Berbasis Web. *Jurnal Insan Farmasi Indonesia*, 6(1), 72–81. <https://doi.org/10.36387/Jifi.V6i1.1301>
- Ismail, F., & Sumaila, N. (2020). Implementasi Manajemen Pembiayaan Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bitung, Sulawesi Utara. *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 1–18.

-
- <https://doi.org/10.14421/Manageria.2020.51-01>
- Khairani, R. N., Latifah, E., & Nila Septianingrum, N. M. A. (2021). Evaluasi Obat Kadaluwarsa, Obat Rusak Dan Stok Mati Di Puskesmas Wilayah Magelang. *Jurnal Farmasi Dan Ilmu Kefarmasian Indonesia*, 8(1), 91. <https://doi.org/10.20473/Jfiki.V8i12021.91-97>
- Lembong, R. Y. B., & Kalalo, M. Y. B. (2022). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Atas Pengadaan Persediaan Obat Pada Rumah Sakit Gmim Kalooran Amurang. *Jurnal Lppm Bidang Ekosobudkum*, 5(2), 593–600. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/39350><https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/download/39350/35775>
- Masruriati Eni, R. S. (2024). Manajemen Pengelolaan Obat Tuberkulosis Di Puskesmas Brangsong 01. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kesehatan (Jikk)*, 1(2). <https://jurnal.naiwabestscience.my.id/index.php/jikk/article/view/41>
- Menkes. (2016). Pmk No. 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas. 2014, 4(June), 1–15.
- Negara, K. S. (2014). Analisis Implementasi Kebijakan Penggunaan Antibiotika Rasional Untuk Mencegah Resistensi Antibiotika Di Rsup Sanglah Denpasar: Studi Kasus Infeksi Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus. *Jurnal Administrasi Rumah Sakit Indonesia*, 1(1). <https://doi.org/10.7454/arsi.v1i1.2169>
- Nur Azizah & Elvi Murniasih, M. A. (2023). Jurnal Inovasi Kesehatan Adaptif. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 5(128), 71–85.
- Nurhidayah Ayi, Setianingsih Zuniawati Lilis, W. E. K. (2023). *Manajemen Puskesmas*. 6.
- Nurlaela, Syarifuddin Yusuf, & Usman. (2022). Manajemen Pengelolaan Obat Di Puskesmas Kabere Kabupaten Enrekang. *Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan*, 5(2), 152–160. <https://doi.org/10.31850/makes.v6i2.774>
- Nurzamzami Aris, A. D. (2023). Analisis Kesesuaian Persyaratan Puskesmas Kelurahan Di Provinsi Dki Jakarta Dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas. *Nucl. Phys.*, 8(7), 4785–4796.
- Ramadhan Bintang Rafi M, Hidayati Rosmalina Agriana, A. (2024). *Evaluasi Penyimpanan Dan Distribusi Psikotropika Di Apotek X Kota Mataram*. 5(September), 8898–8905.
- Sri Devi, Arini Aisyahfira Wijaya, Indah Doanita Hasibuan, Putri Dina, & Adelia Andina. (2024). Analisis Efektivitas Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Simalingkar. *Jurnal Abdi Nusa*, 4(2), 108–119. <https://doi.org/10.52005/abdinusa.v4i2.256>